BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. DESKRIPSI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)[49]

1. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut Daerah Swapraja, yaitu kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1755, sedangkan kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I tahun 1813.

Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak politik yang terakhir Kasultanan tercantum dalam Staatsblaad 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan republic Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi wilayah Negara Republik Indonesia, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil

---

[49] http://[illegible] diakses pada 31 Maret 2013, pkl

Kepala Daerah bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut dinyatakan di dalam:

1. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dan Presiden Republik Indonesia.
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah).
3. Amanat Sri Sultan Hamengu Buwono IX dan Sri Paku Alama VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Pada perjalanan sejarah selanjutnya kedudukan DIY sebagai daerah otonom setingkat Provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan), diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tetang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintah Daerah, dinyatakan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap diakui, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Udang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peran yang penting. Terbukti pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 pernah dijadikan sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia. Pada saat ini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan hamengku Buwono X dan Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh Sri Paduka Paku Alam IX, yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Keduanya memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.

2. Visi Dan Misi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta[50]

a. Visi

Bertitik tolak dari dasar filosofi, kondisi pada saat ini, analisis kekuatan-kelemahan-peluang-tantangan dalam lima tahun kedepan, tahapan dalam rencana pembangunan jangka panjang, dan aspek-aspek potensial yang berkembang selama ini serta mempertimbangkan isu strategis dan perkembangan global yang pesat perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung. Sehubungan dengan hal tersebut maka visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

[50] http://portal.jogjaprov.go.id, diakses pada 31 Maret 2013, pkl 17.43. WIB

"Pemerintah Daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika".

Adapun penjelasan dari visi daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Pemerintah Daerah yang Katalistik adalah Pemerintah Daerah yang mampu mendorong masyarakatnya untuk melaksanakan sendiri hal-hal yang dianggap penting bagi lingkungannya sehingga pemerintah lebih berperan sebagai pengatur dan pendorong dari pada sebagai pelaksana langsung suatu urusan masyarakat. Pemerintah Daerah lebih banyak memberi peluang kepada swasta, memberdayakan masyarakat dan non pemerintah lainnya untuk bersama-sama memikul suatu tanggung jawab atau urusan dengan cara memberikan kesempatan dan mendorong masyarakat serta dunia usaha melalui regulasi, fasilitasi dan pelayanan agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kemandiriannya.

Masyarakat Mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahnnya

Keunggulan Daerah adalah segenap potensi dan sumberdaya daerah yang mempunyai daya saing kuat dan berkontribusi besar terhadap daerah dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan daerah, terutama bidang pariwisata, pendidikan dan budaya.

Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Beretika adalah sumberdaya manusia yang memiliki keahlian atau keterampilan yang tinggi sehingga mampu menawarkan dan melaksanakan jasa atau layanan sesuai dengan aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Sumberdaya manusia tidak hanya menyangkut kuantitas tetapi juga kualitas. Kualitas sumberdaya manusia menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan keterampilan. Dalam hal ini kesehatan dan pendidikan merupakan aspek penting dalam membangun sumberdaya manusia. Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan merupakan modal dasar untuk membina dan mengembangkan karakter serta perilaku manusia di dalam menata hidup dan kehidupannya.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut :

a) Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung.

b) Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal

c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance.

d) Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

3. Kondisi Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 2.1

Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

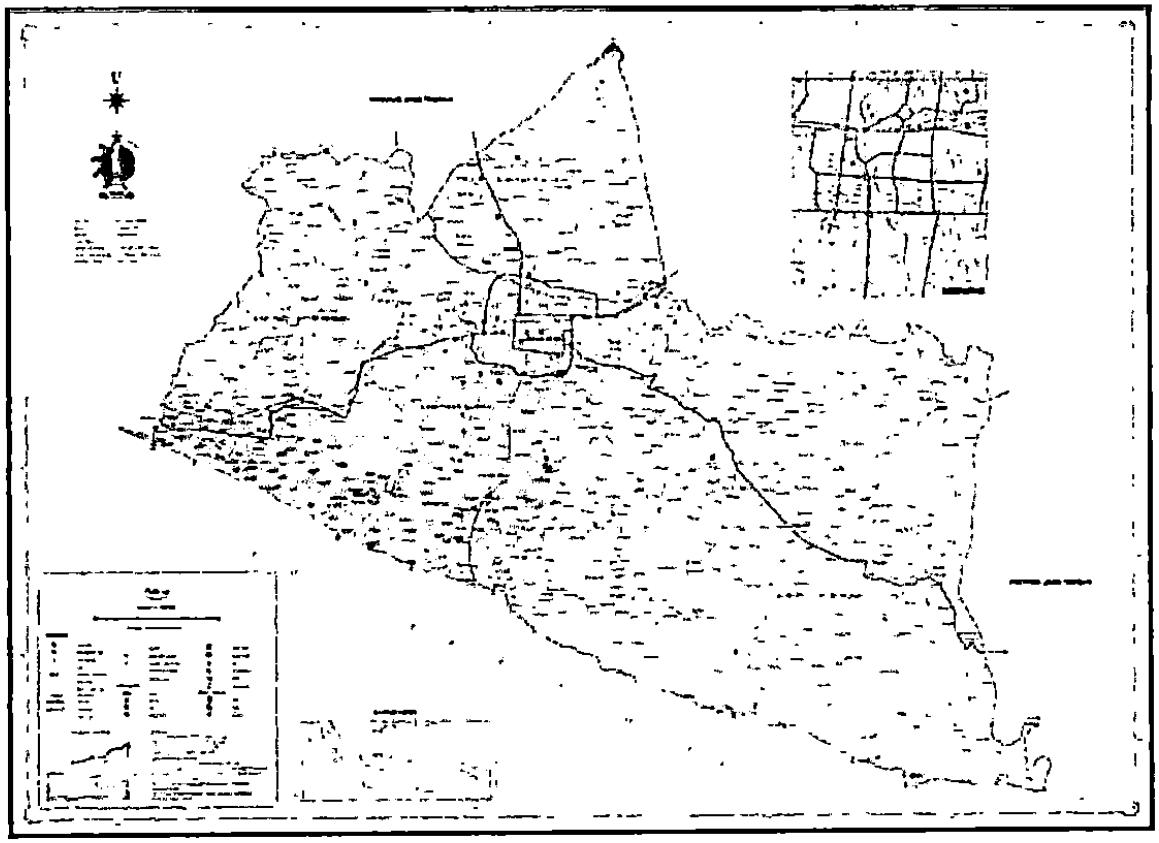

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi terkecil kedua setelah Provinsi DKI Jakarta dan terletak di tengah Pulau jawa, dikelilingi oleh Provinsi Jawa Tengah dan termasuk zona tengah bagian selatn dari formasi geologi Pulau Jawa. Di sebelah selatan terdapat garis pantai sepanjang 110 km berbatasan

m), salah satu dari gunung yang paling aktif di dunia. Luas keseluruhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.185,80 km^2 atau kurang lebih 0,15% luas daratan Indonesia. Di sebelah barat mengalir Sungai Progo, yang berawal dari Jawa Tengah, Sungai Opak di sebelah timur yang berawaal dari Gunung Merapi yang bermuara di laut selatan.

Ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta. Kota-kota lainnya adalah Bantul, Wates, Sleman, dan Wonosari. Secara administrative Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi dalam satu kota dan empat kabupaten, dimana Kota Yogyakarta membentuk kesatuan admiistrasi sendiri. Jarak ke ibu kota Negara Jakarta, adalah 600 km kota-kota besar yang paling dekat adalah Semarang di Jawa Tengah (120 km) dan Surabaya di Jawa Timur (320 km).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah barat dan tenggara dikelilingi oleh barisan pegunungan di sebelah utara oleh Gunung Merapi. Pegunungan di bagian selatan, terutama di Kabupaten Gunung Kidul mencapai ketinggian sampai 700 m. faktor cuaca menyebabkan iklim tropis sepanjang tahun dengan suhu rata-rata, yaitu dari 25°C sampai 32°C, dan ditempat-tempat yang lebih tinggi suhunnya lebih dingin, kelembaban udara tergantung pada musim, umumnya berkisar pada 84%. Musim hujan dimulai pada Bulan Oktober dan berakhir pada Bulan Maret. Musim kemarau berlangsung dari Bulan April sampai Bulan September. Jumlah curah hujan pada jangka waktu satu tahun mencapai 1.750 mm, intensitas tertinggi terjadi pada Bulan Januari sampai Maret, dimana

kemarau angin Muson bertiup dari timur dan hujan turun kurang lebih 3 mm setiap m2.

4. Kondisi Geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Letak Geografis

Secara geografis Provinsi Yogyakarta terletak di tengah-tangah Pulau Jawa, dimana dengan bentuk peta Provinsi Yogyakarta menyerupai segitiga dengan puncak Gunung Merapi di bagian utara yang mempunyai ketinggiang 2.911 m di atas permukaan ari laut, gunung Merapi ini adalah salah satu gunung aktif di Indonesia, sedangkan bawah terdapat dataran pantai yang membentang sepanjang Pantai Selatan yang terletak di pinggiran Samudera Indonesia. Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara 7°.33′ - 8°.12′ Lintang Selatan dan 110°.00′- 110°.50′ Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.890.75 km²), merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang terdiri dari.

b. Batas Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara
- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat

- Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut
- Samudera Indonesia di sebelah Selatan

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 km² atau 0,17 dari luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional, dari 3.185,80 km² luas Yogyakarta, 35,93 persen merupakan jenis tanah Lithosol, 27,41 persen Regosol, 11,94 persen Lathosol, 10,45 persen Grumusol, 10,30 persen Mediteran, 2,23 persen Alluvial, dan 1,74 persen adalah tanah jenis Rensina. Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian antara 100 m - 499 m dari permukaan laut tercatat sebesar 63,18 persen, ketinggian kurang dari 100 m sebesar 31, 56 persen, ketinggian antara 500 m - 999 m sebesar 4,79 persen dan ketinggian di atas 1000 m sebesar 0,47 persen.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Provinsi terkecil kedua setelah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan secara administratif [illegible] meliputi 4 Kabupaten dan 1 Kota Madya diantaranya:

Tabel 2.1

Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten/ Kota	Tanah Sawah	Tanah Kering	Bangunan/ Pekarangan	Hutan Rakyat	Hutan Negara	Jalan	Lainnya	Jumlah
1	Kulonprogo	11.521,29	17.640,90	17.322,65	879,07	856,47	131,70	10.557,01	58.909,09
2	Bantul	16.277,07	12.219,20	14.994,16	845,39	25,00	368,00	5.587,81	50.316,63
3	Gunung Kidul	7.586,53	84.337,66	25.031,49	6.573,96	8.739,86	0,00	13.319,88	145.589,38
4	Sleman	23.494,70	11.816,27	14.389,78	0,00	928,80	0,00	6.161,48	56.791,02
5	Yogyakarta	25,30	201,95	2.491,12	0,00	0,00	189,72	278,70	3.186,79
Total		**58.904,89**	**126.215,98**	**74.229,19**	**8.298,42**	**10.550,13**	**689,42**	**35.904,88**	**314.792,91**

Sumber: http://portal.jogjaprov.go.i

Melihat dari data yang ada dalam Tabel di atas menyatakan bahwasannya Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi terkecil kedua setelah Ibu Kota Jakarta, dimana luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 314.792,91 km². Maka dari itu dapat kita jelaskan luas wilayah dan penggunaan lahan ditiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Yogyakarta. Berdasarkan data yang telah ada disebutkan bahwa luas Kabupaten Kulon Progo 58.909,09 km², kemudian luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 50.316,63 km², luas wilayah Kabupaten Gunung Kidul sebesar 145.589,38 km², luas wilayah Kabupaten Sleman sebesar 56.791,02 km², dan luas wilayah Kota Yogyakarta sebesar 3.186,79 km².

5. Iklim Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Iklim dan cuaca mempunyai sifat spesifik untuk suatu tempat, sehingga keadaannya sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kondisi hidrologi dan tanaman yang mampu beradaptasi pada daerah yang berbeda kondisi iklimnya.

Selain itu, dampak iklim pada kondisi hidrologi daerah setempat adalah pada potensi ketersediaan airtanah dan besarnya aliran permukaan yang dihasilkan. Ketersediaan airtanah merupakan sumber kehidupan bagi manusia yang berada di daerah tersebut. Curah hujan tahunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 718 mm/th sampai 2992.3 mm/th, curah hujan yang rendah umumnya dijumpai di wilayah Gunung Kidul dan Bantul, sedangkan curah hujan yang relatif tinggi dijumpai di wilayah Sleman

Curah hujan terbesar selama kurun waktu 1994-1997 terjadi di Kabupaten Sleman, yaitu tahun 1995 dengan intensitas 2992.3 mm/tahun. Curah hujan paling kecil terjadi di Kabupaten Gunung Kidul yaitu 197.6 mm/tahun pada tahun 1997. Berdasarkan fakta ini dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya air yang besar ditinjau dari banyaknya input dari air hujan. Selain itu potensi sumberdaya air berdasar input curah hujan tersebut dapat ditinjau secara lebih luas berdasarkan periode kering dan periode basah yang tercermin dari jumlah bulan basah (BB) dan bulan kering (BK). Bulan basah (BB) adalah bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm sedangkan bulan kering (BK) merupakan bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm.

B. GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA[51]

1. Profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga kepegawaian yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan perkembangan dari lembaga kepegawaian yang ada sebelumnya. Secara resmi keberadaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1960 tentang susunan organisasi dan formasi pegawai instansi-instansi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui lembaga yang disebut Kantor Urusan Pegawai (KUP).

[51] http://bkd.jogjaprov.go.id/page/profil_bkd_provinsi.div, diakses pada 31 Maret 2013, pkl 17.43

KUP yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 6 (enam) bagian, mempunyai tugas pokok antara lain mengerjakan testing pengangkatan, pemberhentian, pemindahan kenaikan pangkat dan penyelesaian administrasinya, mengurus pemberian uang jajan tetap, deklarasi biaya dan meminjam uang untuk membeli kendaraan, mengurus pensiun janda, anak yatim piatu dan pembayaran pensiun serta tunjangan lain. KUP terletak di Jalan Malioboro Nomor 12-14 yang berada di Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta. Kepala Kantor Urusan Pegawai tercatat pada waktu itu yang menjabat adalah KRT Wirosaputro.

Pada tahun 1973, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Provinsi DIY Nomor 18 Tahun 1973 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi DIY, Kantor Urusan Pegawai berubah namanya menjadi Biro Personalia dengan lokasi dan gedung yang sama. Pada periode ini Kepala Biro Personalia dijabat oleh Drs. KRT Suyono Kusumo.

Biro Personalia mengalami perubahan nama menjadi Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1981 dengan lokasi tetap sama di eks gedung Biro Personalia. Pada tahun 1987, gedung Biro Kepegawaian dipindahkan ke lokasi yang baru tepatnya di komplek kepatihan yang paling utara, yang sekarang menjadi gedung Biro Hukum dan Badan Kerjasama.

Pada era otonomi daerah, seiring dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih otonom, terjadi perubahan kelembagaan termasuk diantaranya adalah Biro Kepegawaian yang berubah menjadi Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi DIY. (berdasarkan Perda Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2000). Adanya peningkatan eselonering pimpinannya menjadikan kewenangannya menjadi lebih luas. Adapun yang menjadi kepala BKD yang pertama sejak perubahan tersebut adalah Drs. SOIM. BKD menempati gedung eks Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi DIY yang terletak di Jalan Suryatmajan Nomor 9A, yang sekarang sudah menjadi Kantor Sekda dan Asek. Kemudian pada tahun 2002 gedung BKD dipindahkan ke luar komplek kepatihan yaitu di Jl. Kyai Mojo Nomor 56 Yogyakarta yang merupakan eks gedung Dinas Kesehatan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 BKD mengalami perubahan kembali menjadi Biro Kepegawaian Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang pertama menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian pasca perubahan dari BKD adalah oleh Ir. SOETARYO. 2 tahun berikutnya yaitu pada tahun 2005, Drs. HARDJONO menggantikan posisi Kepala Biro sebelumnya, sampai pertengahan bulan Agustus 2006 beliau menjalankan tugas sebagai Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi DIY. Pada pertengahan bulan Agustus 2006 beliau wafat saat masih menjabat, dan posisi Kepala Biro Kepegawaian sempat vakum selama beberapa bulan. Setelah hampir 5 bulan vakum, didapatkan pengganti Kepala Biro Kepegawaian yaitu SUDIBYO, SH.

Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan

Setda Provinsi DIY kembali mengalami perubahan kelembagaan menjadi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY dengan Kepala BKD yang pertama pasca perubahan kelembagaan yaitu SUDIBYO, SH.

Setelah menjabat selama lebih kurang 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 01 September 2011, Bapak SUDIBYO, SH memasuki masa Bebas Tugas (BT). Maka, pada tanggal 07 November 2011 dilantiklah pejabat yang baru, yaitu R. AGUS SUPRIYANTO yang secara resmi menjabat sebagai Kepala BKD Provinsi DIY sampai saat ini. Daftar Urutan Periodisasi Menjabat :

Tabel 2.2

Daftar Nama Ketua Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Nama	Periode Menjabat
1	Krt. Wiro Saputro	
2	Drs. Krt Suyono Kusumo	
3	Drs. Marsudi Kartoraharjo	1982-1987
4	Krt. Darukusumo atau Bp. Rusdarundiyo	1987-1992
5	Drs. Mudjono NA	1992-1994
6	Dra. Siti Sulami	1994-1998
7	Sutito, SH	1998-1999
8	Ir. Setyoso Hardjowisastro, M.Si	1999-2000
9	Drs. Soim	2000-2004
10	Ir. Soetaryo	2004-2005
11	Drs. Hardjono	2005-2006
12	Sudibyo, SH.	2006-2011
13	R. Agus supriyanto	2011- sekarang

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan peraturan Perda No 4 tahun 2000. Perda ini dikeluarkan berdasarkan era otonomi daerah yang telah berkembang dan menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang otonom. Dimana dengan keluarnya Perda ini maka terjadi perubahan kelembagaan termasuk diataranya adalah Biro Kepegawaian yang berubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian berdasarkan Perda No 1 Tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 Badan Kepegawaian Daerah mengalami perubahan kembali menjadi Biro Kepegawaian Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakrta.

Kemudian ditetapkan kembali menjadi Badan Kepegawaian Daerah melalui Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Pamong Praja Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta memiliki tugas dan fungsi yang dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksanaan Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut:

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;

b) Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;

d) Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian Pemerintah Kabupaten atau Kota;

e) Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Visi Dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Di dalam sebuah organisasi maka harus ada visi serta misi karena dengan adanya visi dan misi maka arah dan tujuan organisasi tersebut menjadi jelas. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan yang menyangkut ke mana nantinya Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus dibawa kearah dan tujuan yang telah ditetapkan. Dimana visi merupakan salah satu gambaran tentang keadaan masa depan Badan Kepegawaian Daerah. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Yogyakarta mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Adapun visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013 adalah:

"Terwujudnya kebijakan, pengelolaan, fasilitasi kepegawaian yang

Keterangan:

Profesional artinya ahli dalam bidangnya, sehingga apabila kebijakan, pengelolaan dan fasilitasi itu dilaksanakan oleh ahlinya, maka hasilnya dengan sendirinya akan mewujudkan atau mencapai sesuatu yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sejahtera artinya terpenuhinya pemenuhan kebutuhan minimal pegawai sesuai dengan standar yang layak sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja pegawai.

b. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi dimana dengan adanya misi maka diharapkan kepada seluruh anggota organisasi Badan Kepegawaian Daerah mamapu melaksanakan tugasnya dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui keberadaan serta peran Badan Kepegawaian Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pegawai;

b) Meningkatkan pelayanan dan membangun sistem dokumentasi dan sistem informasi kepegawaian;

c) Meningkatkan kapasitas internal

4. Tujuan Dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Tujuan

Adapun tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a) Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kemampuan SDM yang profesional dan sejahtera;

b) Terwujudnya sistem dokumentasi dan informasi kepegawaian yang akurat dan akuntabel;

c) Terwujudnya peningkatan dukungan perencanaan, SDM, ketatausahaan, sarana prasarana dan keuangan Badan.

b. Sasaran

Adapun sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daeah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a) Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, keterampilan, perilaku kerja produktif dan terpenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi keluarganya

b) Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur;

c) Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

d) Terwujudnya pengelolaan arsip kepegawaian yang terpadu dan berkualitas;

e) Terintegrasinya data pegawai melalui Simpeg/data elektronik;

f) Terwujudnya dukungan perencanaan, SDM, ketatausahaan, sarana prasarana dan keuangan badan.

5. Struktur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam sebuah organisasi harus ada yang namanya kelengkapan organisasi, salah satu kelengkapan organisasi tersebut adalah struktur organisasi. dimana struktur merupakan hal yang penting dalam organisasi, dengan adanya struktur maka diharapkan kinerja sebuah organisasi tertata dengan rapi dan terfokus ke tujuan sebuah organisasi tersebut. Maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Yogyakarta menyusun struktur organisasi berdasarkan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY sebagai berikut:

1) Kepala Badan
2) Sekretariat, terdiri dari:
    a) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi
    b) Subbagian Keuangan
    c) Subbagian Umum
3) Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari
    a) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan
    b) Subbidang Pengembangan Karir
4) Bidang Mutasi, terdiri dari:
    a) Subbidang Mutasi Jabatan

b) Subbidang Kepangkatan dan Pensiun

5) Bidang Keududukan Hukum dan Kepangkatan, terdiri dari:

a) Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai

b) Subbidang Kesejahteraan

6) Bidang Tata Usaha Kepegawaian, terdiri dari:

a) Subbidang Dokumentasi

b) Subbidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

7) Balai Pengukuran Kinerja Pegawai (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah):

a) Kepala Balai

b) Subbagian Tata Usaha

c) Seksi Pengukuran dan Pengujian

d) Seksi Hubungan Antar Lembaga

Gambar.2.2

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2012

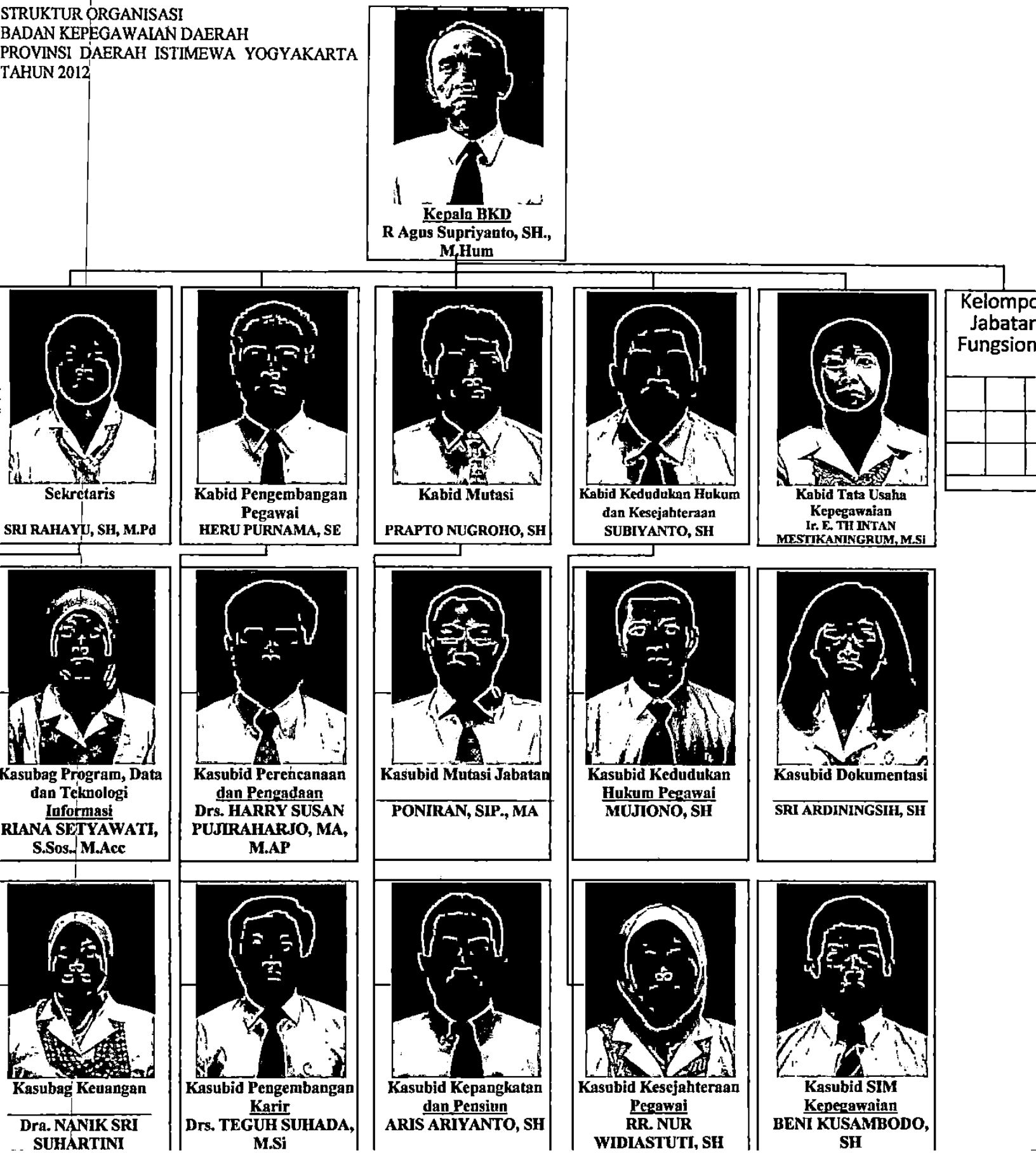

6. Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Organisasi yang mengurusi tentang kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai. Untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan serta melaksanakan tugas dan fungsi sebagai organisasi yang menangani kepegawaian maka diperlukan personil untuk membantu masalah kepegawaian. Maka dengan itu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibantu oleh personil yang berjumlah 85 pegawai, sedangkan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai dibantu dengan personil yang berjumlah 12 pegawai. Adapun jumlah pegawai yang menangani kepegawaian secara keseluruhan sebanyak 97 pegawai dengan rincian pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 53 orang, sedangkan pegawai yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 44 orang.

Untuk memperlancar tugas dan fungsi maka Badan Kepegawaian Daerah harus mempunyai pegawai atau personil yang berkualitas. Oleh karena itu keadaan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dianalisis berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan menurut golongan. Adapun rincian keadaan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah DIY Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	53	55%
2	Perempuan	44	45%
Jumlah		**97**	**100%**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Grafik 2.1

Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah DIY Berdasarkan Jenis Kelamin

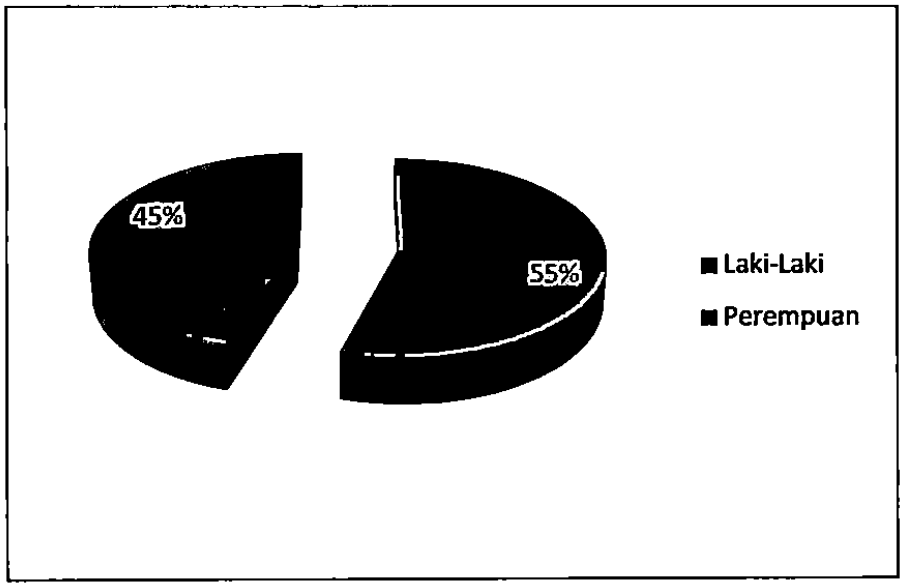

Dilihat dari Tabel di atas yang memaparkan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, maka dapat diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai klasifikasi jenis kelamin laki-laki sebanyak 53 pegawai jika dijadikan persentase sekitar 54,64% , sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 44 pegawai jika dijadikan persentase sekitar 42,26%. Dengan demikian jumlah pegawai yang ada di Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang paling banyak adalah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 53 pegawai. Maka jumlah pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum merata karena masih didominasi pegawai yang berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah DIY Menurut Golongan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Golongan IV	8 Orang	8 %
2	Golongan III	66 Orang	68 %
3	Golongan II	23 Orang.	24%
4	Golongan I	-	-
Jumlah		**97 Orang**	**100%**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Grafik 2.2

Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah DIY Menurut Golongan

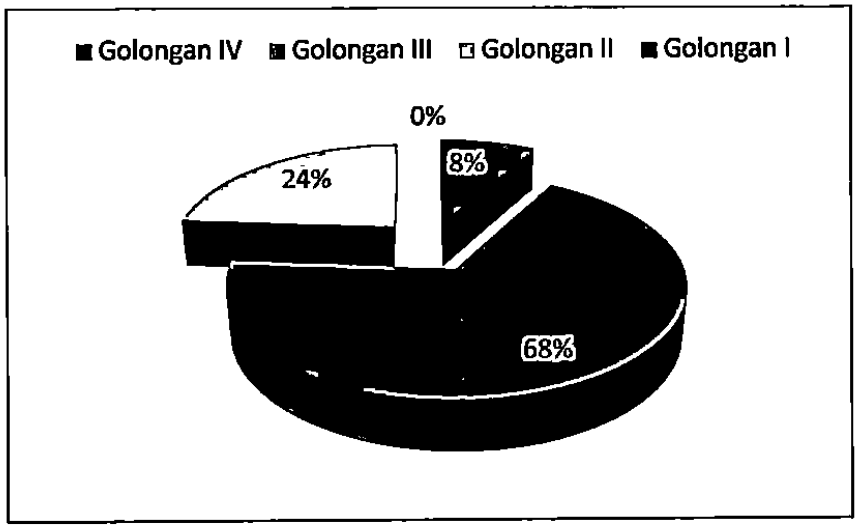

Dilihat dari Tabel dan grafik di atas yang memaparkan jumlah pegawai

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai klasifikasi pegawai yang bergolongan IV, III, dan II. Dengan rincian golongan IV sebanyak 8 pegawai jika dijadikan persentase maka (8%), pegawai golongan III berjumlah 66 pegawai jika dijadikan persentase maka (68%), pegawai golongan II berjumlah sebanyak 23 pegawai jika dijadikan persentase maka (24%), sedangkan pegawai golongan I tidak ada. Berdasarkan data yang ada maka dapat diketahui bahwa di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang paling banyak adalah pegawai golongan III berjumlah 66 pegawai.

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah DIY Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S1	11 Orang.	11,34%
2	S2	47 Orang	48,45%
3	SM/D3	8 Orang	8,25%
4	D2/D1	1 Orang	1,03%
5	SMA/SLTA	25 Orang.	25,77%
6	SMP/SLTP	2 Orang.	2,06%
7	SD	3 Orang	3,09%
Jumlah		**97 Orang**	**100%**

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Grafik 2.3

Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah DIY Menurut Pendidikan

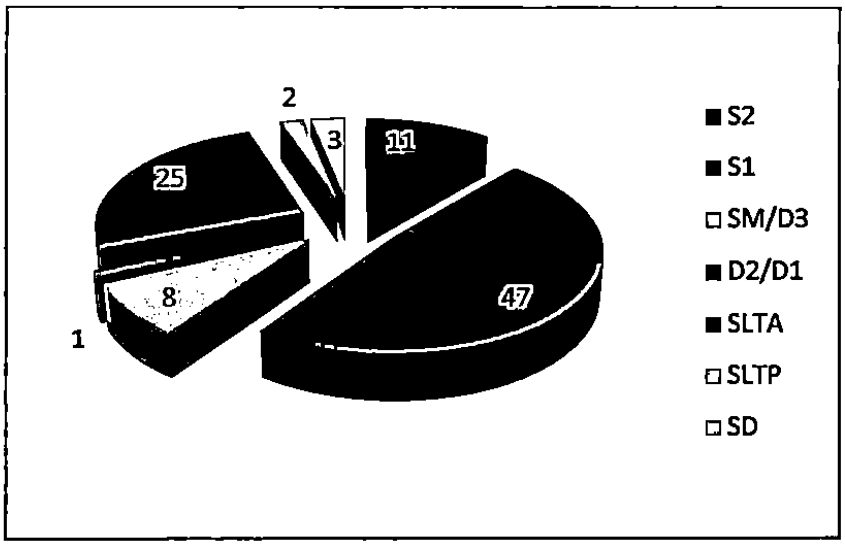

Dilihat dari Tabel dan grafik yang ada di atas maka klasifikasi jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diketahui bahwa pegawai yang berpendidikan S1 sebanyak 11 pegawai jika dijadikan persentase maka (11,34%), pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 47 pegawai jika dijadikan persentase maka menjadi (48,45%), pegawai yang berpendidikan SM/D3 sebanyak 8 pegawai jika dijadikan persentase maka (8,25%), pegawai yang berpendidikan D2/D1 sebanyak 1 orang jika dijadikan persentase maka menjadi (1,03%), pegawai yang berpendidikan SMA sebanyak 25 pegawai jika dijadikan persentase maka menjadi (25,77%), pegawai yang berpendidikan SMP sebanyak 2 pegawai jika dijadikan persentase maka menjadi (2,06%,) dan pegawai yang berpendidikan SD sebanyak 3 pegawai jika dijadikan persentase maka menjadi (3,09%). Dengan demikian jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta paling banyak adalah

7. Jenis-Jenis Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Yang Dilakukan Oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk mewujudkan pegawai yang mempunyai kuantitas dan kualitas tinggi dalam bekerja maka dilakukan pengembangan pegawai yang mana pengembangan tersebut dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai. Untuk mewujudkan pegawai yang berkualitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengembangan dengan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan. Dalam pelaksanaannya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya menfasilitasi pegawai yang akan diikutsertakan dalam program pendidikan dan pelatihan sedangkan yang melakukan program pendidikan dan pelatihan adalah Badan Diklat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didukung dengan beberapa anggaran. Dalam pelaksanaannya anggaran yang digunakan untuk merelaisasikan program pendidikan dan pelatihan diantaranya adalah dana APBD Bandiklat DIY, APBD BKD DIY, dan dana APBN. Dimana anggaran APBD Bandiklat dikeluarkan apabila program pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan bandiklat, dana APBD Badan Kepegawaian Daerah digunakan apabila ada instansi yang mengajukan dana bantuan untuk pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan, sedangkan dana APBN digunakan jika program pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Bandiklat Kementrian Dalam Negeri

RI. Selain itu di dalam program pendidikan dan pelatihan ada tiga macam jenis diklat yakni struktural, fungsional, dan teknis. Adapun jenis pendidikan dan pelatihan yang dikuti dan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6

Jenis-Jenis Diklat Yang Diikuti Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY Tahun 2012

No	Jenis/Nama Diklat	Pelaksana	Peserta
1	Diklat TOT Calon Widyaiswara	Lembaga Administrasi Negara RI Pusdiklat Badan Meterologi	2 orang
2	Diklat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri RI	2 orang
3	Sekolah Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Tingkat Dasar	Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri RI	1 orang
4	Diklat Bidang Pengmebang Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat	Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri RI	2 orang
5	Diklat Perijinan Terpadu Bagi Pej.Strategis	Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri RI	2 orang
6	Diklat Perijinan Terpadu Bagi Pej.Pelaksana	Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri RI	2 orang
7	Diklat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)	Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri RI	2 orang
8	Diklat Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri RI	2 orang
9	TOT Diklat Penyusunan APBD	Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri RI	1 orang
10	Diklat Penanganan Konflik Pertanahan Bagi Pejabat Strategis	Kapusdiklat Kemendagri RI	2 orang

11	Diklat Kepamongprajaan Bagi Camat /Pejabat Strategis	Kapusdiklat Kemendagri RI	1 orang
12	Diklat Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD)	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Dan Standarisasi Diklat	1 orang
13	Diklat Tim Penilaian Aspirasi PNBP	Pusat Diklat Kearsipan ANRI Bogor	2 orang
14	Diklat Programmer Networking Computer	Bina Nusantara	2 orang
15	Pelatihan Monitoring Dan Evaluasi	MAP UGM	1 orang
16	Pelatihan Indikator Kinerja	MAP UGM	5 orang
17	Diklat Dasar Pengujian Kendaraan Bermotor Angkatan 120	Diklat Trasportasi Darat Di Bali	1 orang
18	Diklat Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Dan APBD Story Telling Tahun 2012	Sekretarian GMP Jl. Merdeka Selatan No 11 Jak.Pus	1 orang
19	Pelatihan Admin SIPKD	PT. Usadi Sistemindo Intermatika	2 orang
20	Kursus Bahasa Inggris	Universitas Sana Dharma Yogyakarta	32 orang
21	Diklat Matrikulasi Bagi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD)	LP2MP Undip Semarang	1 orang
22	Pelatihan Integritas Data Dan Penulisan Laporan Pemeriksaan Psikologi	Fakultas Psikologi UAD Yogyakarta	4 orang
23	Diklat Prajabatan	Badan Diklat Provinsi Jawa Timur	2 orang
24	Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang

25	Kehumasan	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang
26	Perencanaan Daerah	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang
27	Bendahara Daerah	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang
28	Kesekretariatan	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang
29	Transformasi Birokrasi	Badan Diklat Provinsi DIY	40 orang
30	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Badan Diklat Provinsi DIY	90 orang
31	Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Badan Diklat Provinsi DIY	100 orang
32	Workshop Pengembangan Aparatur Berwawasan Seni Budaya	Badan Diklat Provinsi DIY	60 orang
33	Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang
34	System Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	Badan Diklat Provinsi DIY	80 orang
35	Pranata Computer	Badan Diklat Provinsi DIY	50 orang
36	Arsiparis	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Di lihat dari Tabel di atas bahwasannya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengikuti 36 macam pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini diikuti guna untuk menambah kompetensi pegawai sehingga pegawai bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan bekerja dengan professional. Pendidikan dan peltihan yang telah diikuti oleh

Tabel 2.7

Jenis-Jenis Diklat Yang Diselenggarakan Badan Pendidikan Dan Pelatihan (Bandiklat) Provinsi DIY Tahun 2012

No	Jenis/Nama Diklat	Pelaksana	Peserta
1	Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang
2	Kehumasan	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang
3	Perencanaan Daerah	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang
4	Bendahara Daerah	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang
5	Kesekretariatan	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang
6	Transformasi Birokrasi	Badan Diklat Provinsi DIY	40 orang
7	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Badan Diklat Provinsi DIY	90 orang
8	Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Badan Diklat Provinsi DIY	100 orang
9	Workshop Pengembangan Aparatur Berwawasan Seni Budaya	Badan Diklat Provinsi DIY	60 orang
10	Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang
11	System Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	Badan Diklat Provinsi DIY	80 orang
12	Pranata Computer	Badan Diklat Provinsi DIY	50 orang
13	Arsiparis	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Di lihat dari Tabel di atas bahwasannya Badan Kepegawaian Daeah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Badan Pendidikan Dan Pelatihan (Bandiklat) telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Adapun jenis pendidikan dan pelatihan yang diselenggaraka Badan Kepegawaian

ada 13 macam jenis pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan guna untuk menambah kompetensi pegawai sehingga pegawai bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan bisa bekerja dengan professional. Pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggaraka oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerjasama dengan Badan Pendidikan Dan Pelatihan (Bandiklat) ini telah diikuti oleh 630 peserta pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2.8

Jenis-Jenis Diklat Struktural Yang Diikuti Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY Tahun 2012

No	Jenis/Nama Diklat	Pelaksana	Peserta
1	Diklatpim tingkat II	Badan Diklat Provinsi DIY	6 orang
2	Diklatpim tingkat III	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang
3	Diklatpim tingkat IV	Badan Diklat Provinsi DIY	73 orang

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Di lihat dari Tabel di atas bahwasannya Badan Kepegawaian Daeah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakn pendidikan dan pelatihan struktural atau diklatpim. Adapun jenis pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah tentang pendidikan dan pelatihan struktural adalah sebagai berikut pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingakt IV. Pendidikan dan pelatihan ini diikuti guna untuk menambah kompetensi pegawai sehingga pegawai bisa melaksanakan tugasnya

struktural yang telah diselenggaraka oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini telah diikuti oleh 109 peserta pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2.9

Jenis-Jenis Diklat Fungsional Yang Diikuti Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY Tahun 2012

No	Jenis/Nama Diklat	Pelaksana	Peserta
1	Diklat TOT Calon Widyaiswara	Lembaga Administrasi Negara Ri Pusdiklat Badan Meterologi	2 orang
2	Pranata Komputer	Badan Diklat Provinsi DIY	50 orang
3	Diklat Arsiparis	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Di lihat dari Tabel di atas bahwasannya Badan Kepegawaian Daeah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakn pendidikan dan pelatihan fungsional. Adapun jenis pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah tentang pendidikan dan pelatihan struktural ada tiga macam jenis pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini diikuti guna untuk menambah kompetensi pegawai sehingga pegawai bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan bekerja dengan professional. Pendidikan dan pelatihan fungsional yang telah diselenggaraka oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini telah diikuti oleh 82 peserta pendidikan

Tabel 2.10

Jenis-Jenis Diklat Teknis Yang Diikuti Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY Tahun 2012

No	Jenis/Nama Diklat	Pelaksana	Peserta
1	Diklat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri RI	2 orang
2	Sekolah Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Tingkat Dasar	Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri RI	1 orang
3	Diklat Bidang Pengmebang Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat	Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri RI	2 orang
4	Diklat Perijinan Terpadu Bagi Pej.Strategis	Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri RI	2 orang
5	Diklat Perijinan Terpadu Bagi Pej.Pelaksana	Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri RI	2 orang
6	Diklat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)	Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri RI	2 orang
7	Diklat Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri RI	2 orang
8	TOT Diklat Penyusunan APBD	Badan Diklat Kementrian Dalam Negeri RI	1orang
9	Diklat Penanganan Konflik Pertanahan Bagi Pejabat Strategis	Kapusdiklat Kemendagri RI	2 orang
10	Diklat Kepamongprajaan Bagi Camat /Pejabat Strategis	Kapusdiklat Kemendagri RI	1 orang
11	Diklat Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD)	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Dan Standarisasi Diklat	1 orang
12	Diklat Tim Penilaian Aspirasi PNBP	Pusat Diklat Kearsipan ANRI Bogor	2 orang

13	Diklat Programmer Networking Computer	Bina Nusantara	2 orang
14	Pelatihan Monitoring Dan Evaluasi	MAP UGM	1 orang
15	Pelatihan Indikator Kinerja	MAP UGM	5 orang
16	Diklat Dasar Pengujian Kendaraan Bermotor Angkatan 120	Diklat Trasportasi Darat Di Bali	1 orang
17	Diklat Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Dan APBD Story Telling Tahun 2012	Sekretarian GMP Jl. Merdeka Selatan No 11 Jak.Pus	1 orang
18	Pelatihan Admin SIPKD	PT. Usadi Sistemindo Intermatika	2 orang
19	Kursus Bahasa Inggris	Universitas Sanata Dharma Yogyakarta	32 orang
20	Diklat Matrikulasi Bagi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD)	LP2MP Undip Semarang	1 orang
21	Pelatihan Integritas Data Dan Penulisan Laporan Pemeriksaan Psikologi	Fakultas Psikologi UAD Yogyakarta	4 orang
22	Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang
23	Kehumasan	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang
24	Perencanaan Daerah	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang
25	Bendahara Daerah	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang
26	Kesekretariatan	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang
27	Transformasi Birokrasi	Badan Diklat Provinsi DIY	40 orang
28	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Badan Diklat Provinsi DIY	90 orang
29	Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Badan Diklat Provinsi DIY	100 orang

30	Workshop Pengembangan Aparatur Berwawasan Seni Budaya	Badan Diklat Provinsi DIY	60 orang
31	Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Diklat Provinsi DIY	30 orang
32	System Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	Badan Diklat Provinsi DIY	80 orang

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Di lihat dari Tabel di atas bahwasannya Badan Kepegawaian Daeah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakn pendidikan dan pelatihan teknis. Adapun jenis pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah tentang pendidikan dan pelatihan struktural ada 32 macam jenis pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini diikuti guna untuk menambah kompetensi pegawai sehingga pegawai bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan bekerja dengan professional. Pendidikan dan pelatihan fungsional yang telah diselenggaraka oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini telah diikuti oleh 619 peserta pendidikan dan